

## PERUBAHAN - APBD 2025

2025

LD NO.8 , LD NO.8 /2025: 10 HLM

PERUBAHAN APBD TA 2025

- ABSTRAK :
- Berdasarkan Ketentuan Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 .
  - Dalam Peraturan ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan; Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang menjelaskan kebutuhan fiskal Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, baik Urusan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan tidak terkait Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 yang terdiri atas:
    - a. Belanja Operasi;
    - b. Belanja Modal;
    - c. Belanja Tidak Terduga; dan
    - d. Belanja Transfer.Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2025, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- CATATAN :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2025 dan ditetapkan 17 September 2025
  - Jumlah Halaman : 10 Hlm.
  - Jumlah Lampiran : 16 LAMP